

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menggali dan menganalisis data temuan BPK RI Perwakilan Jawa Timur dari laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dimana pada tahun 2018 dari 39 pemerintah daerah Jawa Timur (1 Pemprov, 38 Kabupaten/Kota), sebanyak 35 Kabupaten/Kota, Pemprov memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tiga Kabupaten/Kota memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) didapati bahwa penilaian kewajaran laporan keuangan dilihat dari kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Penelitian ini cocok sekali untuk mengetahui macam-macam temuan audit BPK RI Perwakilan Jawa Timur, akun dan permasalahan pengecualian yang terdapat dalam laporan keuangan milik pemkab/kota se-Jawa Timur. Berdasarkan data laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang telah dianalisis penulis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ditinjau Ketidakefektifan SPI diketahui terdiri dari kelemahan yang dimiliki sebagian besar LKPD, dimana paling sedikit sejumlah 2 kelemahan di dalam LHP milik 39 LKPD, yaitu terletak pada sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang belum memadai atau belum tertib sehingga berakibat pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat memanfaatkan dengan segera dana atau pendapat yang ada.

2. Ditinjau dari Ketidapatuhan Perundang-undangan ditemukan sedikitnya dua kelemahan dalam laporan hasil pemeriksaan milik 39 LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, dimana banyak disebabkan oleh kekurangan volume, kelebihan pembayaran, kekurangan penerimaan, dana yang terlambat disetor hingga ada dana yang belum di setor. Itu semua mengakibatkan dana milik pemerintahan Kabupaten/Kota yang seharusnya bias dimanfaatkan untuk lain hal, jadi tertunda dahulu.
3. Ditinjau dari ketidaksesuaian SAP ada yang ditemukan sebanyak sepuluh kasus dalam satu laporan hasil pemeriksaan dan ada beberapa dari 39 LKPD se-Jawa Timur yang sudah sesuai dengan SAP. Dalam kasus yang ditemukan, PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap paling sering muncul sebagai ketidaksesuaian standar akuntansi pemerintah. Pada dasarnya, PSAP No. 7 sering terjadi karena pencatatan aset tetapnya di neraca belum dinilai tertib, seperti belum adanya batas minimal kapitalisasi aset baru, tidak sesuainya rekening belanja modal dengan rekening aset tetap hingga belum terlaksananya penyusutan secara benar. Sehingga PSAP tersebut sering kali muncul bahkan hampir di setiap LKPD Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur.
4. Pada tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur, tiga LKPD memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian terdiri dari Pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung dan Kota Pasuruan. Dalam penelitiannya, komponen neraca merupakan yang sering muncul sebagai akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas

laporan keuangan pemerintah daerah se-Jawa Timur tahun anggaran 2018 dimana yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian adalah aset, khususnya aset tetap serta aset-aset lain yang rinciannya belum memadai. Kemudian terdapat belanja modal berupa jalan, irigasi dan jaringan dimana terjadi kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang ditemukan pada 20 kontrak pekerjaan. Atas nilai tersebut belum dilakukan pemulihan ataupun penetapan dari LKPD yang terkait.

5. Permasalahan yang terdapat dalam akun-akun yang dikecualikan pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah terkait dengan kriteria kewajaran laporan keuangan meliputi ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ketidakefektifan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan dasar opini wajar dengan pengecualian yang terdapat di LHP Kabupaten Jember, Kabupaten Tulungagung dan Kota Pasuruan, terjadi karena banyak yang tidak tertib, dan tidak memadai dalam hal pengelolaan, penatausahaan, rincian laporan, kontruksi pengerjaan hingga tidak sesuai dengan kontrak yang ada.

6. Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa sebanyak apapun temuan dari kriteria penilaian laporan keuangan, tidak selalu mendapat predikat Wajar dengan Pengecualian. Karena temuan-temuan tersebut dapat mempengaruhi opini BPK apabila sudah di nilai bobotnya melalui perhitungan materialitas (PM) dan toleransi of error (TE), dimana jika temuan yang sudah dihitung melebihi batas

kepercayaan dari BPK bisa saja diberikan opini WDP. Selain itu, penentuan opini juga dipengaruhi oleh kesungguhan pemerintah daerah untuk menyelesaikan temuan-temuan. Antara lain, menyetorkan kekurangan volume, melakukan koreksi-koreksi laporan keuangan agar menjadi wajar sesuai Standar akuntansi pemerintahan. Terlihat pada beberapa LKPD mendapat 10 hingga 12 temuan setiap kriteria tetapi masih batas wajar sehingga BPK tidak memberikan opini WDP pada LKPD tersebut. Dan dari temuan yang ada, sudah diberikan rekomendasi atau pembetulan dari BPK pada masing-masing LKPD untuk menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan tahun berikutnya lebih baik lagi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan laporan hasil pemeriksaan (BPK RI Perwakilan Jawa Timur), pemerintah daerah (kabupaten/kota) se-Provinsi Jawa Timur sebagai partisipan dalam penelitian ini untuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dimana dari 39 LKPD hanya sebanyak tiga LKPD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan di tahun 2018, sehingga penelitian mengenai opini wajar dengan pengecualian tidak begitu mendalam dalam hal membandingkan akun dan permasalahan yang dikecualikan.

Penelitian ini juga hanya mengungkapkan temuan-temuan dari 39 LKPD se-Jawa Timur berupa point-pointnya saja dan tidak membahas lebih jauh penyebab terjadinya temuan-temuan tersebut, karena untuk mengetahui penyebab itu diperlukan penelitian tersendiri dan akan

menghasilkan data yang begitu banyak mengingat partisipan yang penulis ambil sebanyak 39 LKPD.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas, adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada LKPD-LKPD se-Jawa Timur serta untuk penelitian selanjutnya, barangkali dapat dilaksanakan dan menjadi perbaikan di tahun-tahun kemudian. Diantaranya yaitu :

- a) Bagi LKPD yang masih memperoleh opini WDP disarankan melakukan studi banding ke LKPD Kabupaten/Kota yang sudah memperoleh opini WTP.
- b) Bagi seluruh LKPD disarankan memberikan pelatihan kepada Kepala Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran, PPK-SKPD, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), bendahara serta seluruh pegawai agar dapat mengelola laporan keuangan dengan baik dan benar hingga opini yang diperoleh bisa mengalami kenaikan atau pun dapat mempertahankan yang sudah ada.
- c) Bagi seluruh LKPD disarankan segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK di tahun-tahun sebelumnya atas temuan-temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketidaksesuaian dengan SAP, dan ketidakefektifan SPI.
- d) Bagi mahasiswa atau penelitian selanjutnya supaya menemukan partisipan yang lebih banyak memperoleh opini wajar dengan pengecualian serta lebih mendalami temuan-temuan diatas.

5.4 Implikasi Penelitian

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya untuk perbaikan akun belanja (belanja modal) dan aset (aset lancar, aset tetap), serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LKPD yang mendapat opini WDP, sedangkan bagi BPK RI sebagai auditor eksternal pemerintah dapat menjadi masukan dalam melakukan pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah khususnya dalam menetapkan tingkat risiko audit.

Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literature akuntansi pemerintahan dan menjadi rujukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan topik yang masih tergolong baru di Indonesia, sehingga diharapkan dapat menjadi tambahan referensi penelitian serta memotivasi peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan yang masih terdapat dalam penelitian ini. Salah satunya dengan memperbanyak jumlah laporan hasil pemeriksaan yang dijadikan sebagai data penelitian.